

BAB III

HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan *website* www.cirebonkota.go.id dalam pelaksanaan *electronic government* di pemerintah Kota Cirebon khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, dan mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan *website* resmi pemerintah dalam rangka pelaksanaan *electronic government* tersebut. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan jawaban wawancara dengan para informan dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis. Penyajian data dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang disajikan didalam penelitian ini adalah penelitian melalui observasi dan wawancara dengan informan di lapangan.

3.1 Pengembangan *Website* www.cirebonkota.go.id dalam Pelaksanaan *Electronic Government* Di Pemerintah Kota Cirebon

Electronic Government adalah suatu interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat maupun *stakeholder* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Pelaksanaan *e-government* memiliki maksud agar dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dapat memberikan kemudahan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Diterapkannya *e-government* diharapkan selain dapat meningkatkan hubungan antara

pemerintah dan pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga terwujudnya *good governance*. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *Electronic Government* di Kota Cirebon. Penerapan *Electronic Government* di Kota Cirebon dapat dinilai berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *Electronic Government*. Salah satu pelaksanaan *e-Government* adalah dengan mengembangkan *website* resmi pemerintah setempat. Terdapat beberapa tahapan dalam mengembangkan *website* pemerintah khususnya di Kota Cirebon agar menjadi *website* pemerintah yang ideal.

3.1.1 Tahap Persiapan

Dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tentunya persiapan merupakan hal yang penting dan menjadi langkah awal pelaksanaan *electronic government* di suatu daerah. Untuk mendukung pelaksanaan *electronic government* tersebut, tahap persiapan yang harus dilakukan pemerintah, yaitu.

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Mengenai penyediaan sumber daya manusia, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyatakan:

“Masih kurang jauh. Kita itu kan ada ya minimal kalo di bidang saya itu di seksi saya infrastruktur itu saya hanya punya 2 staf dan itu basic nya bukan IT, kita terbantu sama teknisi itu yang non-PNS. Di seksi lain itu

ada seksi Keamanan Informasi, justru itu yang harus benar-bener punya kompetensi yang di bidang keamanan sistem informasi, kita belum punya dan di Pemkot Cirebon saya yakin belum ada, belum punya yang sesuai dengan kompetensi itu gitu karena sekarang saya tahu itu ya ada beberapa kampus jurusannya itu khusus tentang keamanan sistem informasi gitu, kita itu belum punya orang yang khusus menangani keamanan informasi. Yang khusus menangani kalo di saya masalah infrastruktur ya. Ada lagi di seksi integrasi sistem, itu ya hanya kepala seksinya saja yang punya basic IT tapi dia tidak punya staf yang kompetensinya masalah integrasi sistem gitu kan.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Kesiapan pegawai dalam pelaksanaan *e-government* di pemerintah Kota Cirebon masih kurang jauh dimana di seksi infrastruktur dan teknologi hanya memiliki 2 staf yang kompetensi dasarnya bukan IT. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terbantu dengan adanya teknisi yang non-PNS. Di seksi lain, seksi keamanan informasi Pemkot Cirebon belum memiliki pegawai dengan kompetensi di bidang keamanan sistem informasi. Kemudian di seksi integrasi sistem, hanya kepala seksinya saja yang mempunyai kompetensi dasar IT, tidak ada staf yang memiliki kompetensi dalam hal integrasi sistem.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“SDM yang mengelola e-gov, ya semua kalo di DKIS ini harus support implementasi e-gov, Cuma untuk SDM IT nya sendiri memang tidak banyak ya sekitar 10 orang yang basic nya IT. Kurang sekali, sangat kurang. Untuk di dinas kita sendiri harusnya lebih banyak.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Dalam pegawai yang menjadi pengelola dalam pelaksanaan *e-government* hanya terdapat 10 pegawai yang memiliki kemampuan di bidang IT. Hal ini dirasa sangat kurang mengingat Dinas Komunikasi Informatika

dan Statistik merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan *e-government* di Pemerintah Kota Cirebon.

Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*, menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Ya yang pasti yang punya kompetensi di IT, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Cuma tidak menutup kemungkinan kompetensi lain tapi kita mempertajam kompetensi IT nya dalam bentuk pelatihan, gitu.”
Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *e-government* utamanya adalah kompetensi di bidang IT. Kompetensi tersebut dapat dipertajam dalam bentuk pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, persiapan pegawai dalam mengelola *e-government* di pemerintah Kota Cirebon sudah dipersiapkan dengan baik. Pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola *e-government* adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Kompetensi pegawai sebagai pengelola *e-government* dipertajam dengan dilakukannya pelatihan.

b. Kesiapan Situs Informasi

Pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki situs informasi, salah satunya yaitu *website* resmi pemerintah Kota Cirebon beralamatkan www.cirebonkota.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Selain itu hampir seluruh OPD yang ada di Kota Cirebon juga

sudah memiliki situs *website*. Berikut pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Kita hampir semua sudah punya *website*, tapi belum semua aktif. Tapi kita sifatnya hanya memfasilitasi, kita buka *hosting* untuk dinas-dinas yang ingin membuat *website*. Jadi silahkan *website* konten mereka bikin sendiri, kita hanya menyediakan tempat.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

OPD di pemerintah Kota Cirebon hampir seluruhnya memiliki *website*, namun belum semua *website* aktif. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bertugas memfasilitasi terbentuknya *website* OPD dimana DKIS membuka *hosting* untuk OPD yang ingin membuat *website*. Untuk konten *website*, masing-masing OPD dipersilahkan untuk membuat sendiri.

Berikut adalah alamat *website* lembaga-lembaga yang ada di Kota Cirebon.

Tabel 3.1
Alamat Website Lembaga

No.	Instansi	Alamat Website
1.	Kota Cirebon	www.cirebonkota.go.id
2.	DKIS Kota Cirebon	dkis.cirebonkota.go.id
3.	BK Diklat Kota Cirebon	bkdiklat.cirebonkota.go.id
4.	Disporbudpar Kota Cirebon	disporbudpar.cirebonkota.go.id
5.	Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon	ketahananpangan.cirebonkota.go.id
6.	Bagian Hukum Kota Cirebon	hukum.cirebonkota.go.id
7.	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	disdik.cirebonkota.go.id
8.	BPMPPKB Kota Cirebon	bpmppkb.cirebonkota.go.id
9.	Komisi Informasi Kota Cirebon	komisiinformasi.cirebonkota.go.id
10.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	keckesambi.cirebonkota.go.id
11.	BPMPT Kota Cirebon	bpmpt.cirebonkota.go.id
12.	Sekretariat Dewan Kota Cirebon	dprd.cirebonkota.go.id
13.	DPUPESDM Kota Cirebon	dpupesdm.cirebonkota.go.id
14.	RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	www.rsudgunungjati.cirebonkota.go.id
15.	Disdukcapil Kota Cirebon	disdukcapil.cirebonkota.go.id
18.	Bappeda Kota Cirebon	bappeda.cirebonkota.go.id

Salah satu website yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah *website* resmi pemerintah Kota Cirebon. Berikut tampilan website resmi pemerintah Kota Cirebon.

Gambar 3.1

Website Resmi Pemerintah Kota Cirebon



Sumber: www.cirebonkota.go.id

Dalam *website* resmi pemerintah Kota Cirebon pada gambar 3.3, terdapat konten-konten seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, berita-berita yang ada di Kota Cirebon, informasi mengenai pariwisata, fasilitas kota dan lainnya. Isi konten dari website pemerintah Kota Cirebon *diupdate* sesuai kebutuhan, seperti misalnya berita yang ditampilkan di *website* *diupdate* sesuai berita yang diliput pada waktu tertentu, untuk informasi *diupdate* apabila terdapat informasi baru. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*;

“Kalau *website* pemkot berita sesuai dengan berita yang diliput oleh bidang komunikasi publik. Tapi kalau untuk informasi, nah secara berkala saya harus nanya bidang informasi publik kalau sifatnya

informasi publik ya. Kalau berita kan ada di komunikasi publik, mereka yang kayak wartawan ya yang mendampingi Pak Wali gitu ya. Jadi memang kita udah berbagi tugas, bidang-bidangnya.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Website resmi pemerintah Kota Cirebon berisi berita-berita kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Cirebon dan juga informasi-informasi yang bersifat informasi publik. Lain halnya dengan pendapat Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, yang berpendapat sebagai berikut:

“Sudah ya sepertinya. Sudah ada di *sub-domain* di *website* resmi pemerintah Kota Cirebon” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Dalam *website* resmi juga terdapat tautan *sub-domain* yang menghubungkan situs *website* resmi pemerintah Kota Cirebon dengan situs *website* OPD.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Cirebon sudah membuat situs informasi hampir di seluruh OPD namun belum semua *website* OPD aktif. Salah satu situs informasi yang merepresentasikan Kota Cirebon yaitu *website* resmi pemerintah Kota Cirebon memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

3.1.2 Tahap Pematangan

Tahap pematangan disini yaitu sejauh mana pemerintah Kota Cirebon menerapkan *electronic government* dalam mengembangkan *website* yang interaktif dan terhubung dengan OPD lain yang ada di Kota Cirebon.

a. Situs Informasi Publik Interaktif

Situs informasi publik dalam hal ini adalah adanya situs yang dapat memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon melakukan interaksi dengan publik selain melalui website resmi pemerintah Kota Cirebon sendiri, tetapi juga melalui sosial media seperti Instagram dan Twitter. Berikut pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Baru sebatas informasi melalui website, jadi seperti berita kegiatan yang dilakukan pemerintah, profil Kota Cirebon dan lain sebagainya”
Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Website resmi pemerintah Kota Cirebon berisi baru sebatas informasi seperti informasi berita kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, profil Kota Cirebon, dan lain sebagainya.

Menurut Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Di *website* sudah terdapat informasi ya. Ada yang namanya Surat Warga juga itu di *website* jadi masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukan, memberikan komentar seperti itu di *website*.”
Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Website resmi pemerintah Kota Cirebon memiliki laman yang bernama “Surat Warga” dimana laman tersebut memiliki kegunaan sebagai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. masyarakat dapat bertanya, berkomentar maupun memberikat keluhan, saran dan masukan kepada pemerintah pada laman “Surat Warga” tersebut.

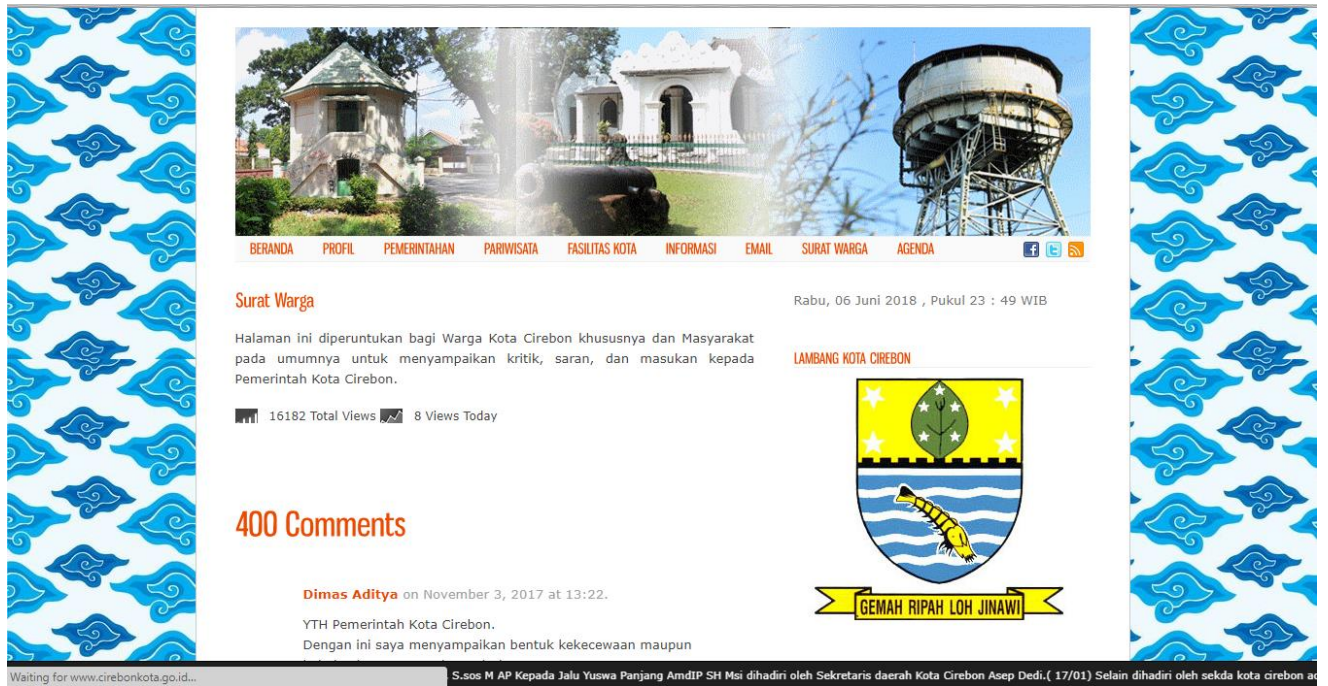
Pendapat lainnya disampaikan oleh Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Sudah, jadi untuk berinteraksi dengan publik kita mempunyai ya *website* itu sendiri, kemudian ada Instagram, Twitter gitu lah media sosial.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Dalam berinteraksi dengan publik, pemerintah Kota Cirebon selain memiliki *website*, juga memiliki sosial media seperti Instagram dan Twitter. Berikut adalah tampilan website resmi pemerintah Kota Cirebon dimana didalamnya terdapat kolom “Surat Warga” sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Gambar 3.2

Kolom Surat Warga dalam *Website* Resmi Pemerintah Kota Cirebon



Sumber: www.cirebonkota.go.id

Kemudian berikut adalah tampilan media-media sosial yang dimiliki pemerintah Kota Cirebon.

Gambar 3.3

Akun Instagram Pemerintah Kota Cirebon



Sumber: www.instagram.com/pemdakotacrb

Akun Instagram pemerintah Kota Cirebon dibuat mulai bulan September tahun 2016 yang sampai saat ini memiliki pengikut sebanyak 2.979 dan 768 postingan.

Gambar 3.4

Akun Twitter Pemerintah Kota Cirebon



Sumber: www.twitter.com/PemdaKotaCrb

Akun Twitter pemerintah Kota Cirebon dibuat mulai bulan November tahun 2016 yang sampai saat ini memiliki pengikut sebanyak 522 dan 1.184 postingan. Kedua akun tersebut di atas dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Cirebon dalam berinteraksi dengan publik memanfaatkan website resmi dan juga media sosial seperti Instagram dan Twitter. *Website* Kota Cirebon sudah memberikan informasi, masyarakat juga dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan di *website*.

b. Situs Antar Muka Keterhubungan dengan Lembaga Lain

Situs antar muka keterhubungan dengan lembaga lain dalam pelaksanaan *electronic government* di Kota Cirebon dapat dilihat melalui adanya tautan atau *link* yang terdapat di situs *website* resmi pemerintah Kota Cirebon. Dalam *website* pemerintah Kota Cirebon terdapat tautan-tautan yang menghubungkan situs *website* pemerintah Kota Cirebon dengan lembaga lain dan juga terdapat tautan yang menghubungkan dengan organisasi-organisasi perangkat daerah setempat. Berikut pernyataan Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, yang berpendapat sebagai berikut:

“Sudah ya sepertinya. Sudah ada di *sub-domain* di *website* resmi pemerintah Kota Cirebon” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Website pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki tautan atau *link sub-domain* yang menghubungkan situs *website* resmi dengan situs-situs *website* OPD setempat. Menurut Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Kita buka *hosting* untuk dinas-dinas yang ingin membuat *website*, lalu nanti kita taro di *website* resmi sebagai *sub-domain* yang mengaitkan ke *website* OPD” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas untuk membuka *hosting* untuk OPD-OPD yang ingin membuat *website*, kemudian *link* website OPD tersebut ditampilkan dalam *website* resmi sebagai *sub-domain*. Menurut pernyataan Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Ada, bukan lembaga lain sih sebenarnya jadi kita memang di pengelola Bakohumas ya Badan Koordinasi Kehumasan Indonesia itu, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu wajib

menampilkan GPR (*Government Public Relationship*), nah jadi kebijakan-kebijakan pusat itu wajib ditampilkan di setiap website instansi termasuk di daerah itu kan instansi daerah itu kan ya jadi cirebonkota.go.id sama di website yang kita kelola itu kita pasti tampilin, jadi konektivitasnya seperti itu sebenarnya. Udah, cuma ya baru sampe sebatas itu. Tapi kalo dengan dinas-dinas lainnya di Kota Cirebon ada *link* nya.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah memiliki kewajiban untuk menampilkan GPR (*Government Public Relationship*), jadi kebijakan-kebijakan pusat wajib ditampilkan di setiap *website* instansi termasuk di pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam *website* Pemerintah Kota Cirebon sudah terhubung dengan *website* lembaga lain namun baru dengan satu lembaga, yaitu dalam bentuk GPR atau *Government Public Relation* yang menautkan *website* pemerintah Kota Cirebon dengan *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, *website* pemerintah Kota Cirebon juga menyediakan tautan yang terhubung dengan OPD yang ada di Kota Cirebon.

3.1.3 Tahap Pemantapan

a. Situs Transaksi Pelayanan Publik

Situs transaksi pelayanan publik dalam hal ini melihat apakah *website* sudah menjadi situs yang menyediakan fasilitas transaksi secara elektronik antara pemerintah dan masyarakat seperti menambahkan fasilitas pembayaran, fasilitas penyerahan formulir dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dan agar lebih

efisien. Dalam website pemerintah Kota Cirebon sendiri tidak terdapat transaksi dalam pelayanan publik, karena website pemerintah Kota Cirebon sendiri sifatnya hanya sebagai portal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Transaksi pelayanan belum ada yah baru sebatas informasi melalui website, jadi layanan yang sifatnya melayani masyarakat dalam hal kebutuhan masyarakat belum. Kalo diluar website sudah ada seperti perijinan online tapi transaksinya masih semi elektronik” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Website pemerintah Kota Cirebon belum memiliki transaksi pelayanan publik dimana baru sebatas informasi, layanan yang bersifat melayani masyarakat belum ada. Namun jika diluar *website* resmi sudah ada seperti perijinan online namun transaksinya masih semi elektronik. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* berikut:

“Dia sebagai portal sebenarnya, jadi kalau mau lihat berita atau kegiatan yang lebih rinci ya harus masuk ke website OPD nya, gitu. Makanya walaupun nanti dirubah tetep sederhana kalo portal. Karena dia sifatnya portal, nanti banyak *link* yang ada, *link* ke OPD gitu atau ke pelayanan lain pelayanan publik kayak PTSP jadi ada *link* aja.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Website resmi pemerintah Kota Cirebon merupakan situs yang digunakan sebagai portal, jadi apabila ingin melihat informasi yang lebih rinci harus masuk ke *website* OPD. Karena sifatnya portal, makan akan terdapat banyak *link* ke OPD lain. Pernyataan lain disampaikan oleh Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

“Saat ini belum sampai tahap transaksi ya, masih menyampaikan informasi saja.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *website* Pemerintah Kota Cirebon yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon belum sampai pada transaksi pelayanan publik karena *website* tersebut sifatnya sebagai portal sehingga baru terdapat penyampaian informasi saja.

b. Interoperabilitas Aplikasi Maupun Data Dengan Lembaga Lain

Interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain yaitu kemampuan aplikasi maupun data yang digunakan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan lembaga lain sehingga terdapat adanya pertukaran informasi atau data. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik belum memiliki interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain, namun untuk antar OPD yang ada di Kota Cirebon sudah tetapi hanya sebagian sehingga hal ini menjadi tujuan pemerintah Kota Cirebon itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Kalo dalam internal kita udah tapi kalau lembaga lain belum yah kayaknya. Kalo di dalam pemkot sih banyak udah, antar OPD udah sebagian kayak BKD dengan DKIS kemudian nanti tahun ini kita ingin mengintegrasikan, menginteroperabilitaskan data penduduk dengan beberapa sistem informasi gitu, tapi baru sebagian yang terwujud gitu belum semua cuma ini tujuan kita.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Pada tahun 2018, pemerintah Kota Cirebon ingin mengintegrasikan, menginteroperabilitaskan data penduduk dengan beberapa sistem informasi. Hal ini menjadi tujuan pemerintah Kota Cirebon untuk kedepannya. Pendapat lainnya disampaikan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, sebagai berikut:

“DKIS sudah menyusun standard untuk interoperabilitasnya, tapi OPD tidak melakukan itu sehingga ketika harus diintegrasikan terkendala. Awalnya banyak OPD yang tidak berkoordinasi dengan DKIS, lebih dari 50% tapi sekarang dengan terbentuknya organisasi baru di awal 2017 ini, selain itu DKIS juga punya struktur organisasi dari kepala dinas sampai ke bawah, DKIS berkomitmen untuk menyampaikan ke OPD bahwa ini tupoksi DKIS silahkan koordinasi dengan DKIS. Ini dilakukan supaya OPD sadar dan mengetahui bahwa sebenarnya ada yang harus OPD lakukan ketika ingin membangun aplikasi.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki standard untuk interoperabilitas data maupun aplikasi, namun OPD masih tidak menjalankan standard tersebut sehingga integrase harus terkendala. DKIS memiliki komitmen untuk menyampaikan kepada OPD bahwa hal ini merupakan tupoksi DKIS sehingga OPD harus berkoordinasi dengan DKIS jika ingin membangun aplikasi. Pernyataan lain disampaikan Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

“Kalau interoperabilitas data saat ini baru data ya seperti data kepegawaian bisa digunakan lembaga lain.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *electronic government*, pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon belum memiliki aplikasi yang digunakan bersama dengan lembaga lain, namun hal tersebut menjadi tujuan pemerintah Kota Cirebon untuk mewujudkan penerapan *electronic government* ke arah yang lebih baik.

3.1.4 Tahap Pemanfaatan

Tahap pemanfaatan adalah tahap tertinggi dalam penerapan *electronic government*. Pada tahap ini pemerintah diharapkan mampu untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu dalam bentuk aplikasi untuk pelayanan G2G (Government to Government), G2C (Government to Citizen) dan G2B (Government to Business) yang terintegrasi.

Dalam penerapan *electronic government*, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon belum memiliki aplikasi pelayanan yang terintegrasi. Berikut pernyataan Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Jadi gini, kalau pelayanan publik yang pasti publik itu kan ada 2 ada bisnis ada citizen kan, nah kalo PTSP itu bisa melayani yang G2B dan G2C sebenarnya tapi belum terintegrasi. Tapi antar government to government belum.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Pemerintah Kota Cirebon dalam mengembangkan *website* resmi belum sampai pada tahap pemanfaat dimana belum terdapat integrasi didalamnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Kalau aplikasi yang terintegrasi secara menyeluruh belum ada, karena keterbatasan SDM dan anggaran.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Pengembangan *website* resmi pemerintah Kota Cirebon belum terintegrasi disebabkan oleh keterbatasan SDM dan anggaran. Pernyataan dari Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai berikut:

“Untuk sekarang kalau untuk *website* itu sendiri sepertinya belum ada.”
Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik belum dapat memanfaatkan teknologi informasi berkaitan dengan penerapan *electronic government* secara maksimal. Pemerintah belum memiliki aplikasi yang terintegrasi baik dengan instansi lain, swasta ataupun masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Website *www.cirebonkota.go.id* dalam Pelaksanaan *Electronic Government* di Kota Cirebon

3.2.1 Support

Support adalah adanya keinginan yang dimiliki pemerintah untuk dengan sungguh-sungguh menerapkan *e-Government*, bukan hanya mengikuti tren saja.

1. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah disini, yaitu dalam bentuk *political will* dalam menerapkan *e-government* yang dapat dilihat salah satunya yaitu dibangunnya superstruktur terkait *e-government* seperti adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang jelas. Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam menerapkan

e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

“Untuk dari sisi *e-gov* ya, *e-gov* itu bagian dari *smart city*. Kan ada 6 elemen *smart city* ya ada *e-gov*, ada *smart living*, ada *environment* dan lain sebagainya. Nah tujuan untuk *e-gov* sendiri adalah bagaimana pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien.”
Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Hal sama juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Efisiensi efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, itu yang kita harap bisa dicapai.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Penerapan *electronic government* di Kota Cirebon didasari oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Selain peraturan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika juga menjadi dasar dalam penerapan *E-Government*. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi menyatakan:

“Ada beberapa aturan yang sudah kita keluarkan, diantaranya Perda Penyelenggaraan Kominfo” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Dasar hukumnya sebenarnya sih masih *pake* Inpres Nomor 3, masih *pake* itu sama kita punya Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Belum

ada peraturan teknis kita, penyelenggaraan teknis ya itu Peraturan Walikota itu belum ada yang akan dibuat.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan konsep *electronic government* di Kota Cirebon ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik namun belum maksimal, karena belum ada peraturan teknis maupun peraturan walikota yang khusus mengatur tentang penerapan *E-Government*.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dalam penerapan *e-government* di sini, yaitu disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat dan masyarakat melalui berbagai cara dimana sosialisasi bertujuan untuk mendapatkan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan dari penerapan *electronic government* dapat tercapai. Berikut penjelasan oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi;

“Sudah, masyarakat sudah misalnya untuk pajak, dinasnya sendiri sering melakukan sosialisasi, baik melalui baliho atau melalui media cetak, begitu juga dengan yang lainnya. Aparat juga sudah karena dalam setiap kesempatan kepala dinas selalu menyampaikan bahwa ada yang harus dilakukan oleh setiap OPD terkait dengan implementasi *e-government*.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Sosialisasi telah dilakukan baik di masyarakat maupun di OPD.

Untuk masyarakat, sosialisasi dilakukan oleh OPD terkait. Sosialisasi

yang dilakukan melalui baliho maupun media cetak, sedangkan untuk aparat, sosialisasi dilakukan dan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di berbagai kesempatan.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“Kalo sosialisasi ada di OPD cuma untuk publik memang kita masih kurang ya. Kita memang bikin video yang kita taro di Youtube, kemudian ada dalam bentuk kita kan punya kelompok informasi masyarakat tuh, biasanya kita ada rutin setahun ya memang ga banyak sih setahun berapa kali gitu kita undang kita ada informasi baru kita sampaikan melalui kelompok informasi masyarakat. Kemudian ada lagi relawan TIK mereka juga yang melatih masyarakat sekalian sosialisasi. Itu kita, bentuknya seperti itu cuma sekarang judulnya udah *smart city* gitu bukan *e-gov* lagi.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Sosialisasi terkait *electronic government* oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan membuat video yang diunggah ke akun Youtube milik pemerintah Kota Cirebon. Kemudian Pemerintah Kota Cirebon juga mengundang kelompok informasi masyarakat yang ada di Kota Cirebon untuk menyampaikan informasi terbaru terkait *electronic government*, hal tersebut dilakukan secara rutin beberapa kali dalam setahun. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dibantu oleh relawan TIK dalam mensosialisasikan *elektronik government* ke masyarakat.

Kepala Seksi Infrastruktur dan Informatika menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Sosialisasi ada sudah ya di OPD, kepala dinas langsung yang mensosialisasikan. Kalau untuk publik ada juga tapi saya rasa masih kurang ya.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Dari hasil wawancara di atas mengenai sosialisasi dalam penerapan *electronic government* dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah melakukan sosialisasi baik di masyarakat maupun aparat pemerintah setempat. Namun sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat masih kurang.

3.2.2 Capacity

Capacity adalah salah satu elemen dalam mewujudkan keberhasilan *Electronic Government* yaitu berupa unsur kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan *capacity* ini, yaitu ketersediaan sumber daya finansial yang cukup, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

1. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan unsur yang penting didalam penerapan *electronic government* karena ketersediaan dana mempengaruhi berhasil atau tidaknya penerapan *electronic government* di suatu daerah. Sumber daya finansial harus dipersiapkan

dengan matang, karena tanpa adanya pendanaan yang cukup maka penerapan *electronic government* tidak dapat diterapkan secara maksimal. Berikut pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi berkaitan dengan sumber daya finansial dalam penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon:

“Untuk anggaran ada dari APBD, nah untuk tahun ini karena ada program *smart city* kita lagi banyak mencoba kerjasama dengan stakeholder, kerjasama dengan pihak Telkom, Indosat, Biznet, kerjasama dengan kementerian seperti itu.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Anggaran dana dalam pelaksanaan *e-government* di pemerintah Kota Cirebon berasal dari APBD, namun untuk tahun ini dengan adanya program *smart city*, pemerintah Kota Cirebon mencoba bekerjasama dengan stakeholder maupun dengan pihak penyedia jasa layanan komunikasi. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*:

“APBD yang paling utama, kalau *e-gov* APBD kota saja sama APBD provinsi. Ya hanya itu. Tiap tahun meningkat sekarang alhamdulillah dengan DKIS, dulu cuma 1 M. Iya disetujui, sekarang udah mulai meningkat, tahun kemaren ya itu 2,5 ampe 3. Tahun ini karena ada pembangunan *command center* kita bisa sampe 6 M, jadi tiap tahun naik. Rata-rata segitu 2,5 sampe 3 rutinnya.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan *e-government* meningkat setiap tahunnya dengan dibentuknya DKIS yang sebelumnya anggaran statis yaitu 1 Miliar rupiah. Sekarang sudah mulai meningkat sehingga mencapai 2,5 Miliar sampai dengan 3 Miliar rupiah.

Khusus untuk tahun ini dikarenakan sedang ada pembangunan *command center* maka anggaran dana bisa mencapai 6 Miliar rupiah.

Dalam hal alokasi anggaran untuk infrastruktur, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mengatakan:

“Infrastruktur itu tahun ini sekitar 1,4 M, itu include biaya langganan internet kurang lebih karena untuk biaya langganan internet sendiri hampir 500 juta. Sebagian besar itu untuk biaya internet, lain-lainnya kita buat pemeliharaan jaringan wireless, pemeliharaan tower, pemeliharaan server lalu ada audit TIK, juga ada lalu pengadaan perangkat pendukung jaringan. Tahun ini justru malah turun, tahun kemaren kita dapetnya lumayan lebih dari 1,5 M, makanya itu kan tergantung kita diberi dari pemerintah kotanya, nanti kita diberi dari pemerintah kotanya sekian nanti kita dapetnya sekian. Jadi ya fluktuatif gitu sebetulnya, cuman biasanya ga jauh dari segitu, paling plus minusnya sedikit sih, paling plus minusnya 100juta paling itu 200juta.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Anggaran dana untuk infrastruktur sendiri tahun sekitar 1,4 Miliar rupiah termasuk dengan biaya langganan internet yang mencapai hampir 500 juta rupiah, biaya pemeliharaan jaringan *wireless*, pemeliharaan tower, pemeliharaan server dan juga pengadaan perangkat pendukung jaringan. Namun tahun ini anggaran dana infrastruktur menurun sekitar 100 juta rupiah, sehingga anggarannya fluktuatif.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya finansial yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk penerapan *electronic government* berasal dari APBD. Anggaran dana tersebut setiap tahunnya fluktuatif atau tidak selalu sama. Namun, untuk tahun ini

anggaran dananya meningkat dikarenakan oleh adanya pembangunan *command center*. Anggaran dana *electronic governmet* di Kota Cirebon hanya dari APBD saja namun dengan adanya program *smart city* yang dijalankan pada tahun ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mencoba melakukan kerja sama dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi dan ketersediaan pegawai yang dibutuhkan dalam penerapan *electronic government*. Mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam penerapan *electronic government*, Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* mengatakan:

“Ya yang pasti yang punya kompetensi di IT, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Cuma tidak menutup kemungkinan kompetensi lain tapi kita mempertajam kompetensi IT nya dalam bentuk pelatihan, gitu.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Hal lain disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Kebanyakan yang lulusan IT, walaupun ada beberapa yang bukan lulusan IT tapi karena mereka mungkin ditugaskan oleh Walikota duduk di posisi itu jadi sambil belajar dan sebagainya ya mereka harus. Tapi memang sebagian besar *basic* nya IT yang menangani walaupun ga semuanya itu karena kekurangan SDM itu.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan dalam penerapan *electronic governmet* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon

adalah yang memiliki kompetensi di bidang IT. Namun tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan IT.

Selanjutnya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon masih terbatas, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi berikut.

“SDM nya terbatas, di sini programmer cuma ada satu Pak Iid saja yang PNSnya, makanya direkrut Non-PNS 6 orang, open recruitmen. Itu untuk menutupi kekurangan SDM rekrutmen PNS karena PNS kena moratorium. Nah kita juga mengembangkan *transfer of knowledge*, ada transfer ilmu pengetahuan, misalkan tentang web ya diajarin.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* mendukung pernyataan diatas.

“Di DKIS, pengelola termasuk yang 6 ya yang kita rekrut kemarin, berarti 6 tambah kita 7 di bidang ini doang 13. Tapi ada bidang TIK kan yang masalah infrastruktur, di TIK tuh ada 11 sama kabidnya, itu.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

“SDM yang mengelola *e-gov*, ya semua kalo di DKIS ini harus *support* implementasi *e-gov*. Cuma untuk SDM IT nya sendiri memang tidak banyak ya sekitar 10 orang yang *basic* nya IT. Kurang sekali, sangat kurang. Untuk di dinas kita sendiri harusnya lebih banyak.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa ketersediaan pegawai yang memiliki kompetensi IT yang

dibutuhkan dalam penerapan *electronic government* masih kurang maksimal.

Kemudian mengenai pelatihan dan pengembangan pegawai dalam penerapan *electronic government*, Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* mengungkapkan hal sebagai berikut.

“Pelatihan ada, berkala kalo disebutnya setahun sekali berkala ya ada. Bisa 4 kali mungkin sekarang tahun ini. 4 kali setahun.”
Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

“Jadi kayak seminar atau diklat, memang kalau diklat belum begitu banyak ya tapi lebih banyaknya itu ke seminar-seminar yang lebih spesifik gitu. Diklat spesifiknya itu belum begitu banyak gitu. Tidak berkala sih sebetulnya karena itu berkaitan dengan anggaran juga dan berkaitan juga dengan tempat penyelenggaraannya juga kan biasanya ga banyak kalau begitu ya, tempat penyelenggaraan diklat-diklat gitu seminar. Kalau sekarang itu banyaknya diklatnya itu lebih ke diklat administratif gitu, diklat teknis seperti kita itu kurang makanya ketika ada undangan, kita bisa ya kita ikut gitu. Kalau memang ada peluang kita bisa ikut diklat tersebut ya diupayakan kita juga ikut, Karena itu kan bagian dari kita untuk menambah kompetensi.”
Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Pelatihan pegawai yang dilakukan oleh DKIS dilakukan setahun sekali maupun setahun empat kali. Pelatihan dilakukan dengan seminar ataupun diklat, namun untuk diklat belum begitu banyak. Pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala karena hal tersebut berkaitan dengan anggaran dan tempat penyelenggaraannya belum

banyak. Diklat yang dilakukan lebih kepada diklat administratif, diklat teknis masih kurang.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan maka dapat diketahui bahwa pengembangan dan pelatihan pegawai dalam penerapan *electronic government* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon tidak dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pelatihan tersebut dilakukan dalam bentuk seminar ataupun diklat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang IT.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan *electronic government*. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang mendukung maka penerapan *electronic government* tidak mungkin terwujud.

Berikut pernyataan dari Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Untuk di Kota Cirebon untuk infrastruktur itu sudah sampe ke kelurahan, jaringan koneksinya ya. Untuk internet, untuk di Kota Cirebon tuh di Dinas Kominfo Statistik ini *bandwith* diadakan di satu pintu hanya di DKIS, nah setelah diadakan di DKIS nanti dibagi ke masing-masing OPD. Untuk di kota Cirebon infrastrukturnya masih jadi ada 2 ya, ada yang menggunakan FO, ada yang menggunakan *wireless* jadi masih belum semua FO. Yang menggunakan FO hanya di komplek perkantoran Bima, itu udah pake FO semua. Kalo yang lain masih pake *wireless*. Kita masih pake *wireless* 2,4 dan 5,3.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Di pemerintah Kota Cirebon, infrastruktur jaringan koneksi sudah sampai pada kelurahan. Untuk infrastruktur internet, *bandwith*

diadakan di satu pintu yaitu hanya di DKIS yang kemudian dibagikan ke masing-masing OPD. Infrastruktur yang ada dibagi menjadi 2, ada yang menggunakan *Front Office* (FO), ada yang menggunakan *wireless* jadi masih belum semua FO. Daerah yang menggunakan FO yaitu hanya di kompleks perkantoran Bima, dan daerah lainnya masih menggunakan *wireless* 2,4 dan 5,3. Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

“Jadi kalo bicara tentang infrastruktur di pemerintah kota ya terutama, kita itu sudah membangun infrastruktur dari tahun 2003 itu sudah sampai kelurahan, itu dulu masih ya teknologinya menggunakan nirkabel, jaringan *wireless*. Sekarang berkembangnya jaman dan juga pertumbuhan penduduk semakin padat, sekarang *wireless* sudah mulai banyak interverensi, karena kalau dulu mah sinyal *wireless* 2,4 giga kan masih belum banyak. Sekarang 2010 keatas ini sudah padet, sekarang kita ada beberapa di kantor kita terutama yang dekat dari sini, kita kan *data center* disini. Itu yang di daerah perkantoran Bima yang Gedung Korpri belakang itu sudah pake *fiber optic*. Itu ada kantor, 6 apa 7 kantor sudah ada *fiber optic*. Untuk wilayah 3, kita ya bisa dibilang, dulu malah se-Jawa Barat kita ya sampe jaringan itu sampai kelurahan. Sekarang juga udah banyak sih ada di daerah kabupaten/kota lain sampe kelurahan dengan teknologi ya macem-macem ada yang *wireless* juga ada, ada yang pake *fiber optic* juga ada. Memang masih dominan *wireless* kita. *Fiber optic* karena *cost* nya itu kan tinggi *fiber optic*, kita pernah hitung itu untuk area Kota Cirebon itu sekitar 22 Miliar, nah 22 Miliar itu bagi Pemerintah Kota Cirebon bukan nilai yang sedikit itu cukup besar. Jadi sampai saat ini kita belum bisa *full fiber optic*, kita masih pake *wireless*, ya rata-rata sebagian besar *wireless*. *Bandwithnya* internet *dedicated* 100 lokal dan 50 internasional, untuk ke OPD-OPD internet broadband up to 500mbps” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Infrastruktur di pemerintah Cirebon juga sudah terdapat *data center*. Pemakaian *fiber optic* untuk seluruh wilayah Kota Cirebon masih dirasa berat bagi pemerintah Kota Cirebon dimana *costnya* yang tinggi yaitu untuk area Kota Cirebon itu membutuhkan biaya sekitar 22

Miliar. Dari hasil wawancara informan di atas, dapat diketahui bahwa infrastruktur di Kota Cirebon telah sampai ke kelurahan. Teknologi yang digunakan sebagian besar *wireless*.

Berikut adalah infrastruktur yang sudah dibangun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon sampai tahun 2018:

Tabel 3.2

Infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Tower Triangle	60	60		
2	Rack Server Racmount 40 U	3	3		
3	Rack Wallmount 12 U	2	2		
4	UPS	3	3		
5	Net Protektor	1	1		
6	Router Rb 1100 AH	10	6		4
7	Router Dinara	3	0		3
8	Switch Manageable	6	3		3
9	CRS 1036	5	5		
10	CCR 226	1	1		
11	CCR 212	2	1		1
12	CCR 106	12	12		
13	Router Haplite	20	20		
14	Router wireless Outdoor RB433	108	72		36
15	Router wireless Outdoor RB800	12	8		4
16	MiniPCI	186	149		37
17	Jumper Ntape Male	168	142		26
18	Antena Omni 2.4 Ghz	8	6		2
19	Antena Omni 5 Ghz	3	3		
20	Antena Grid 2.4 Ghz	176	122		54
21	Antena Grid 5 Ghz	36	34		2
22	Braket Antena	223	180	43	

Sumber: Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki sarana prasarana yang cukup memadai dalam menunjang penerapan *electronic government* di Kota Cirebon. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*;

“Memadai untuk bekerja sudah, ideal belum. Kalo bicara ideal belum, tapi untuk bekerja untuk saat ini ya alhamdulillah berjalan.” Wawancara tanggal 21 Maret 2018

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

“Kalo dibilang cukup sih cukup, memadai, tapi kita juga tidak hanya sampai jaringan wireless saja, kita juga inginnya kan lebih stabil terutama untuk jaringan yang membutuhkan kapasitas besar, CCTV, itu ada CS lampu merah, itu kalau pakai wireless sinyal keganggu sebentar ilang gambarnya gitu, nah salah satunya itu. Kalau dibilang cukup ya sebetulnya untuk kondisi sekarang yang berbagai sektor membutuhkan akses internet ya memang agak berat, agak kurang stabil ya. Memang sekarang trennya hampir semua di kabupaten/kota itu fiber optic gitu.” Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Dalam menerapkan *electronic government* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki rencana kedepan sebagai wujud kesungguhan dari pemerintah Kota Cirebon. Berikut pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi:

“Rencana selanjutnya kita ingin terus mengembangkan kualitas pelayanan termasuk sarana prasarana. Contoh sekarang aksesibilitas menggunakan wireless, Cirebon kan anginnya gede hujannya gede besar ya, kalau wireless kan tidak stabil. Kami ke provider minta value edit untuk aksesibilitas internet, kita langganan tapi kita minta value edit nilai tambahnya, 30 jaringan pake fiber optic. Nah itu value editnya bukan KKN ya jadi kita dapat bonusnya itu tapi itu untuk pelayanan pemerintah itu penyelenggaraan pemerintah yang stabil.” Wawancara tanggal 14 Februari 2018

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi:

“Rencana ada penyedia yang memang akan, CSR nya mereka lah, dari perusahaan telekomunikasi dia bangun telekomunikasi, dia kasih benefit kita jaringan FO tapi dengan syarat ya didepan kantor mereka ada jaringan mereka gitu. Itu nanti akan diserahkan ke kita juga. Ada beberapa titik juga, tapi itu belum fix.”
Wawancara tanggal 22 Maret 2018

Rencana selanjutnya pemerintah Kota Cirebon berkeinginan untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan termasuk sarana prasarana. Salah satunya yaitu dengan bekerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pekerjaan dalam menerapkan *electronic government*. Namun dalam hal infrastruktur jaringan dapat dikatakan masih kurang menunjang dalam penerapan *electronic government*. Untuk rencana penerapan *electronic government*, ke depannya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon akan bekerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk menambah jaringan *fiber optic* sehingga jaringan komunikasi lebih stabil dan daya muatnya lebih besar.

3.2.3 Value

Value adalah manfaat yang diperoleh dari penerapan *electronic government* di suatu daerah.

1. Manfaat *Electronic Government* Bagi Pemerintah Kota Cirebon

Manfaat penerapan *electronic government* bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

“Yang jelas kita sudah ya sampai saat ini sih memang belum banyak ya, tapi yang udah paling kerasa itu yang pendapatan, memang akhirnya setelah penerapan, sistem pendapatan naik untuk PAD meningkat. Baru sektor itu, terus sekarang tuh dengan adanya kita ya seperti kehadiran, seperti ini kan disiplin pegawai naik. Absen, kan sekarang harus absen pagi-pagi, kalo ngga dipotong gajinya. Ya baru itulah yang keliatan.”

(Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*)

“Manfaatnya banyak ya sebetulnya, seperti mempercepat pekerjaan, paperless ya kertas bisa lebih irit terus transparansi pemerintahan seperti laporan-laporan keuangan kita *upload* ke website jadi bisa dilihat oleh masyarakat, memudahkan layanan dan lain sebagainya.”

(Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi)

“Jelas sangat besar manfaatnya karena bisa menunjang pekerjaan sehari-hari. Kemudian mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.”

(Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi)

Dari hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penerapan *electronic government* di Kota Cirebon bagi pemerintah Kota Cirebon adalah menunjang pekerjaan pegawai pemerintah, memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi

kepada masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik serta Pendapatan Asli Daerah meningkat. *Electronic government* juga mengakibatkan penggunaan kertas menjadi berkurang.

2. Manfaat *Electronic Government* Bagi Masyarakat

Manfaat dari penerapan *electronic government* di Kota Cirebon bagi masyarakat sebagai pengguna dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

“Saya tahu tentang penerapan *e-gov*, tahu *website* pemerintah juga cuma belum pernah liat tapi tahu ada karena pernah diberitakan di koran Radar Cirebon.”

(Irman Darajat, Guru SMA)

“Ngga tahu pasti sih kalo ada *website* Kota Cirebon tapi pernah baca di media sosial atau surat kabar gitu jadi belum pernah buka juga.”

(Irlangga, Wiraswasta)

“Kalo tahu ada *websitenya* mah ya setiap kota pasti ada websitenya kan kayaknya ya, tapi ngga pernah sama sekali ngunjungi itu, ga pernah buka jadi gatau isinya.”

(Ayu Putri Aninda, Mahasiswa)

“Jadi mudah untuk mendapatkan informasi secara cepat kemudian memudahkan pula dalam hal pelayanan atau administrasi publik.”

(Fathia Sismayani Candra, Mahasiswa)

Dari hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penerapan *electronic government* di Kota Cirebon bagi masyarakat yang merupakan pengguna layanan kurang dirasakan. Masyarakat kurang tahu mengenai adanya *website* pemerintah Kota Cirebon dan belum pernah mengunjungi *website* tersebut.